

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Peran *Policy Actor* dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fenomena di mana pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menjadi kebijakan yang sedang digencarkan oleh beberapa pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayah tersebut. Kebijakan pemekaran wilayah ini turut diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Proses formulasi kebijakan yang terbilang cukup lama dan sampai saat peneliti menulis ini, kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas belum diberlakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran aktor kebijakan yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari masing-masing aktor kebijakan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh para aktor kebijakan dalam proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sasaran penelitian yang ditentukan oleh teknik *purposive sampling*. Penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas belum rampung dilakukan. Dengan proses yang cukup panjang meliputi aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Ketiga aliran tersebut belum berhasil dilalui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam upaya merumuskan kebijakan pemekaran wilayah yang melibati banyak aktor. Jendela kebijakan yang terbuka saat ketiga aliran bertemu belum dapat terwujud. Aliran masalah yang menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dari ketimpangan pembangunan tidak hanya dengan mewujudkan kebijakan pemekaran wilayah. Kemudian, dalam aliran kebijakan diketahui bahwa kebijakan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan karena adanya kebijakan moratorium yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun dalam aliran politik, kebijakan pemekaran wilayah ialah kebijakan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas.

Kata kunci: Pemekaran Wilayah, Formulasi Kebijakan, Peran Aktor Kebijakan

SUMMARY

This research is entitled *The Role of Policy Actors in the Formulation of Regional Expansion Policies in Banyumas Regency*. The title is motivated by the phenomenon where regional expansion or the formation of new autonomous regions (DOB) is a policy that is being intensified by several local governments. The main goal is to improve the welfare of the community and advance the region. This regional expansion policy was also pursued by the Regional Government of Regency Banyumas. The policy formulation process is quite long and until the time the researcher is writing this, the policy on regional expansion of Banyumas Regency has not been enacted. Therefore, researchers are interested in examining the role of policy actors involved in the policy formulation process for the expansion of the Banyumas Regency.

This research aims to describe the role of each policy actor and identify the obstacles experienced by policy actors in the process of policy formulation for the expansion of Banyumas Regency. This research used a descriptive qualitative approach, with research targets determined by purposive sampling technique. The author used observation, interviews, and documentation as data collection methods. Which was then analyzed using the interactive analysis method.

The results of this study show that the policy formulation process for the expansion of Banyumas Regency has not been completed. The process is quite long, including problem stream, policy stream, and political stream. The three streams have not been successfully passed by the Banyumas Regency Regional Government in an effort to formulate a regional expansion policy that involves many actors. The policy window that opens when the three streams meet cannot be realized. The problem stream shows that solving the problem of development inequality is not only by realizing the policy of regional expansion. Then, in the policy stream, it is known that the policy cannot proceed to the decision-making stage due to the moratorium policy set by the central government. However, in the political stream, the policy of regional expansion is a policy that has the full support of all factions in the DPRD of Banyumas Regency.

Keywords: Regional Expansion, Policy Formulation, Role of Policy Actors